



Jangan Beri Peluang Pungli

Dosa Pemberi Sama dengan Penerima

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meminta masyarakat tidak memberi peluang aparat maupun instansi di lingkungan Pemkot menarik pungutan liar (pungli). Masyarakat mesti berani menolak pungutan di luar pungutan resmi.

"Dosa orang yang memberi pungli itu sama dengan orang yang menerima pungli," tegas Kepala Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Herman Sulistyono di kompleks Balaikota Timoho, Kamis (5/3).

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Purwanto mengatakan, Pemkot sedang mendata biaya-biaya resmi yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus masalah kependudukan maupun perizinan di kelurahan dan kecamatan. Hasil pendataan nantinya disusun dalam bentuk semacam album dan dipasang di kantor lurah dan kantor camat.

"Ini niat kami untuk memberikan pelayanan secara transparan. Pak camat pasti mau untuk bikin album inventarisir biaya-biaya, *wong* demi transparansi.

Tapi masyarakat juga harus berani. Kalau ada pungutan melebihi ketentuan, masyarakat harus berani untuk tidak memberi," ujarnya.

Mengenai pengurusan KTP yang diwakilkan, Purwanto menilai, pengurusan KTP yang dititipkan pengurus RT atau pengurus RW masih wajar. Hal tersebut dimungkinkan seandainya warga tidak sempat mengurus KTP.

Pada bagian lain, dia menegaskan, Pemkot tidak mengatur soal kotak uang yang harus diisi uang seikhlasnya oleh warga yang berurusan dengan kelurahan dan kecamatan.

Jika kotak-kotak semacam itu masih dijumpai, harus segera disingkirkan. Kotak yang boleh dipajang hanya kotak amal titipan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS), panitia pembangunan masjid, atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

"Kotak-kotak yang ada adalah kotak BAZIS dan semacamnya. Kalau ada kotak-kotak yang lain, perlu ditiadakan. Pemkot *nggak* menginstruksikan. Kami akan mencermati lagi di kelurahan," tandasnya. (fir)

turkan Kepada Yth. :

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Tata Pemerintahan | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005